

Anies Baswedan: Tidak Ada Ruang bagi Pelaku Kekerasan Seksual

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengancam pelaku kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. "Tidak ada ruang bagi kekerasan dan pelecehan di seluruh lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta," ujarnya melalui unggahan sosial media Instagram miliknya, Rabu (10/8).

Ia menegaskan, hukuman yang diberikan yakni pemecatan seketika dan diserahkan kepada pihak berwajib. "Pelaku kekerasan di video yang viral sudah kami ketahui dan langsung dipecah hari itu juga, lalu diserahkan kepada polisi untuk ditindak secara hukum," jelasnya.

Saat ini, Anies melanjutkan, pihaknya telah memberikan perlindungan, pendampingan kesehatan, psikologis dan hukum. Ia pun mengapresiasi warga yang masih peduli dan membantu memviralkan kejadian bejat tersebut. "Terima kasih atas kepedulian dan video laporan netizen terkait tindakan brutal, barbar dan sama sekali tidak bisa ditolerir ini," tegasnya.

Ia pun mengimbau, bagi masyarakat yang melihat tindak kekerasan usahakan langsung mencegah. "Tapi bila khawatir keselamatan atau memperburuk akan keadaan, maka silakan foto/ rekam dan laporkan pada yang berwenang atau hubungi Jakarta Siaga 112," pungkas mantan Mendikbud RI itu.

Cemburu
Petugas Penanganan

Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Rawa Barat berinisial Z, tega menganiaya pacarnya berinisial E. berdalih melakukan perbuatan keji itu karena cemburu buta.

Kejadian itu viral di media sosial. Dalam sebuah video, terlihat seorang pria yang mengenakan pakaian PPSU sedang menganiaya seorang perempuan.

Pria itu menendang dan menjambak korban. Pria tersebut kemudian terlihat menaiki sepeda motornya dan langsung menggilas korban dengan motornya. Korban terlihat tertabrak dan terjungkal ke arah belakang.

Lurah Bangka, Firdaus Aulawy, membenarkan adanya kejadian itu. Firdaus menyebutkan kejadian itu terjadi di Jalan Kemang VI, Senin (8/8) siang.

Firdaus menjelaskan, korban berinisial E, yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Bangka, berpacaran dengan Z, yang juga petugas PPSU Kelurahan Rawa Barat. Saat itu, Z diduga cemburu hingga nekat menganiaya E.

Lebih lanjut, Firdaus menuturkan kondisi E setelah dianiaya pacarnya. Firdaus juga sempat menyarankan E melakukan visum atas kejadian tersebut.

"Keadaannya ada di ruangan saya. Menurut pengakuan dia setelah ditanyakan keadaan dia baik-baik saja. Dia bilang secara fisik dilihat dengan mata tidak ada luka. Kita sarankan visum, yang bersangkutan tidak berkeinginan," ujar Firdaus. ● yan

Bodetabek Harus Segera Miliki Panduan Rancang Kota

JAKARTA (IM) - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pemerintah daerah di wilayah Bodetabek harus segera memiliki Panduan Rancang Kota (PRK).

Hal tersebut dibutuhkan karena keberhasilan pengembangan wilayah berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) sangat bergantung pada peran pemerintah daerah melalui PRK.

"Saat ini BPTJ giat mendorong pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Bodetabek untuk segera menyusun pedoman PRK di wilayahnya masing-masing," kata Direktur Prasarana BPTJ, Jumardi dalam pernyataan tertulisnya Selasa (9/8).

Jumardi menuturkan permasalahannya di Jabodetabek saat ini belum semua pemerintah daerah memiliki PRK dalam bentuk payung hukum yang kongkret. Dia mengatakan baru Pemerintah DKI Jakarta yang relatif mampu berperan maksimal dalam pengelolaan TOD.

"Karena DKI Jakarta telah memiliki panduan rancang kota dalam bentuk payung hukum yang jelas," tutur Jumardi.

Untuk itu, Jumardi mengungkapkan BPTJ sudah menyelenggarakan kegiatan FGD untuk meningkatkan pemahaman pemerintah kota dan kabupaten mengenai implementasi TOD. Pada Juli 2022, BPTJ mengadakan FGD di Kota Bekasi dengan juga mengundang Pemprov DKI Jakarta untuk berbagi pengalaman.

Dengan kegiatan tersebut, Jumardi berharap Pemerintah Kota Bekasi segera dapat merumuskan pedoman PRK untuk wilayahnya. "Ini agar implementasi TOD di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik," tutur Jumardi.

Jumardi menambahkan

kan, TOD merupakan konsep penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan di daerah perkotaan. Dia menegaskan, dalam mengatasi kemacetan bukan sekedar mengajak pemilik kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum masal tetapi juga mengoptimalkan tata ruang secara efektif.

Dia menuturkan, TOD merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan transportasi dan tata guna lahan. "Transit itu berhubungan dengan angkutan umum dan development itu mengembangkan tata guna lahan," ucap Jumardi.

Dengan begitu di wilayah Jabodetabek yang sudah teraglomerasi, menurutnya kesuksesan TOD menjadi salah satu pendekatan mengatasi kemacetan. Hal tersebut akan efektif apabila semua pemerintah daerah mampu menjalankan perannya secara maksimal.

"BPTJ sebagai bagian dari perangkat pemerintah pusat kewenangannya terbatas pada melakukan koordinasi dan memfasilitasi semua stakeholder di Jabodetabek untuk berperan mengintegrasikan layanan transportasi perkotaan di Jabodetabek," ungkap Jumardi.

PRK merupakan perangkat yang menjembatani antara perencanaan kota dengan desain arsitektur dalam pembangunan fisik bagian bagian kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkotaan. Komponen fisik tersebut yaitu aspek-aspek lain yang dipertimbangkan menyangkut juga ekonomi, sosial budaya, lingkungan sehingga mendukung terwujudnya lingkungan kota yang terpadu, serasi, dan berkelanjutan.

"Untuk itu, dibuatlah PRK untuk mengatur dengan sangat detail kawasan TOD dan daerah dalam radius 500 meter di sekitarnya," ujar Jumardi. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



ATLET-ATLET BERPRESTASI DIANGKAT JADI PNS

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (kanan) memberikan surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Lifter Ni Nengah Widiasih (kedua kanan) di Kemepora, Jakarta, Rabu (10/8). Pemerintah mengangkat sebanyak 193 atlet berprestasi, di antaranya 57 atlet difabel dan 136 atlet nondifabel, menjadi PNS sebagai wujud terima kasih atas prestasi para atlet sekaligus untuk memotivasi agar dapat lebih berprestasi di kancah internasional, khususnya Olimpiade dan Paralimpiade.

DIRESMIKAN RIDWAN KAMIL PEKAN LALU

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Belum Dapat Diakses Pengunjung

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini belum menghibahkan Situ Rawa Kalong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pasalnya, danau masih tahap pengamanan karena asetnya belum diserahkan, kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Situ Rawa Kalong, Nurdin.

DEPOK (IM) - Sejak Situ Rawa Kalong, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Jumat (5/8), fasilitas panggung apung belum dapat diakses pengunjung. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Situ Rawa

Kalong, Nurdin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum menghibahkan Situ Rawa Kalong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Pasalnya, revitalisasi Situ Rawa Kalong sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov Jabar. "Kemarin waktu kunjung-

an Gubernur itu kan baru peresmian, makanya nanti akan ada proses administrasi hibah terkait sarana prasarana tersebut. Nanti setelah diserahkan ke Pemkot Depok, dikelola oleh Depok, nanti baru (bisa digunakan)," kata Nurdin saat dihubungi, Rabu (10/8).

Nurdin belum dapat memastikan kapan Situ Rawa Kalong dihibahkan kepada Pemkot Depok. "Kalau hasil komunikasi, secepatnya (dihibahkan) dari SDA Jabar tuh, tetapi kami enggak tahu pasti sampai berapa bulan prosesnya," kata Nurdin.

Di sisi lain, Nurdin mengungkapkan, jumlah pengunjung Situ Rawa Kalong telah meningkat setelah direvitalisasi. Banyak pengunjung yang ingin menjajal panggung apung

tersebut. "Malah tambah banyak pengunjung, malah pada foto-foto, terus mau masuk area itu (panggung apung) di kunci gitu," kata Nurdin.

"Ya kayak gini, saya banyak ngejelasin juga itu danau masih tahap pengamanan karena asetnya belum diserahkan," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil bersama jajaran Pemkot Depok meresmikan Situ Rawa Kalong pada Jumat pekan lalu. Situ Rawa Kalong merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Depok dalam merevitalisasi ruang publik yang berkualitas. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan bahwa fokus utama revitalisasi itu yakni akses masuk Situ Rawa Kalong yang dulunya sulit di-

jangkau. "Jadi di sini itu yang penting, dulunya susah diakses, sekarang mudah diakses. Dulu susah duduk-duduk tenang, sekarang tempat kita doorstep saja teduh ya," kata Emil kepada wartawan di lokasi, Jumat.

Selain itu, Emil juga memamerkan fasilitas panggung apung yang dinilai memiliki keistimewaan. Emil mengklaim, inovasi panggung apung di situ tersebut belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. "Yang terpenting fasilitasnya tadi ada panggung yang mengapung di air, istimewa, instagramable, dan bikin warga Depok bahagia," kata Emil.

"Mudah-mudahan pascapandemi ini memberikan semangat warga Depok punya ruang publik yang baik," harap Emil. ● yan

Langkah Pemkab Bekasi Tingkatkan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, terus mendorong perangkat daerah agar semakin serius dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut disampaikan saat mengikuti penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Saya berharap perangkat daerah serius mengimplementasikan reformasi birokrasi dan mengisi dari evaluasi SAKIP ini. Kita akan dorong bahwa peningkatan indeks juga terasa oleh masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih cepat, mudah dan terukur," jelas Dani di Ruang Command Center Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Selasa (9/8).

Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan konseling dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat atas SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Bekasi, terdapat peningkatan kinerja dari sisi pencatatan eviden dan juga target-target yang terpenuhi oleh perangkat daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah sudah mampu menyajikan dokumen perencanaan kinerja yang baik. "Yang namanya evaluasi kan pasti selalu adanya kekurangan-kekurangan. Ini justru menambah motivasi kita untuk semakin meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi maupun nilai SAKIP, agar dapat mengalami peningkatan di akhir tahun ini," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (10/8).

Dalam upaya untuk meningkatkan indeks SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Dani menjelaskan pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah, seperti melaku-

kan evaluasi pada forum Rapat Pimpinan (Rapim)

dengan menayangkan rapor pencapaian reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah setiap bulannya. Hal tersebut bertujuan untuk memotivasi perangkat daerah.

"Jadi kami tayangkan rapor pencapaian reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah, mana yang sudah tinggi dan mana yang masih rendah. Bagi perangkat daerah yang mengalami kendala kita akan lakukan pendampingan khusus sampai bisa mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.

Tak hanya itu, upaya yang sudah dilakukan Pemkab Bekasi untuk meningkatkan penilaian SAKIP, salah satunya dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang sudah terintegrasi dengan memberikan reward disetiap akhir semester kepada perangkat daerah dan kecamatan yang berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

Dani juga berharap, pada penilaian SAKIP RB tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi BB, setelah sebelumnya Pemkab Bekasi mendapatkan nilai B.

"Kita ingin naik minimal ke BB, syukur-syukur nanti



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, (tengah) saat mengikuti penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Command Center, Gedung Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Selasa (9/8).

kan evaluasi pada forum Rapat Pimpinan (Rapim)

dengan menayangkan rapor pencapaian reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah setiap bulannya. Hal tersebut bertujuan untuk memotivasi perangkat daerah.

"Jadi kami tayangkan rapor pencapaian reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah, mana yang sudah tinggi dan mana yang masih rendah. Bagi perangkat daerah yang mengalami kendala kita akan lakukan pendampingan khusus sampai bisa mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.

Tak hanya itu, upaya yang sudah dilakukan Pemkab Bekasi untuk meningkatkan penilaian SAKIP, salah satunya dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang sudah terintegrasi dengan memberikan reward disetiap akhir semester kepada perangkat daerah dan kecamatan yang berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

Dani juga berharap, pada penilaian SAKIP RB tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi BB, setelah sebelumnya Pemkab Bekasi mendapatkan nilai B.

"Kita ingin naik minimal ke BB, syukur-syukur nanti

tahun berikutnya bisa ke A. Sehingga ini bisa memberikan semangat dan keyakinan jika kita serius dan fokus bekerja keras Insya Allah peringkat tertinggi itu bisa kita capai," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, menyampaikan bahwa dalam upaya menaikkan level SAKIP dan RB, Pemkab Bekasi telah mengupayakan beberapa rencana aksi yang dibuat.

"Untuk SAKIP sebenarnya ini rencana aksinya kita menyelesaikan dokumen perencanaan, kemudian dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2023 - 2026. Kita juga sedang menyusun data kerjanya, nanti itu ada di BK-PSDM. Ini yang masih *on progress*," terangnya.

Sementara mengenai Reformasi Birokrasi, Pemkab Bekasi telah melakukan penataan pada beberapa area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, regulasi kebijakan, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. ● mdl



PELUNCURAN YOUTUBE PERIKSA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (keempat kiri) berbincang bersama Head of Government Affairs and Public Policy at YouTube Danny Ardianto (kiri), Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf (kedua kiri), Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Lies Dina Liastuti (ketiga kiri), Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril (kedua kanan) serta Managing Director YouTube India, Southeast Asia dan Emerging Markets Ajay Vidyasagar (kanan) pada acara Peluncuran YouTube Health - PERIKSA (Penyedia Ragam Informasi Kesehatan Anda) di Jakarta, Rabu (10/8). PERIKSA merupakan fitur terbaru YouTube untuk memudahkan orang mencari dan mengevaluasi informasi kesehatan yang kredibel dari para ahli kesehatan.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT USAHA HANDALAN PERKASA

Dengan ini, Direksi PT Usaha Handalan Perkasa, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 26 Agustus 2022
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jalan Jendral Sudirman Kav. 56
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Agenda :
1. Laporan Tahunan 2021
2. Laporan Keuangan 2021
3. Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris 2021
4. Laporan Pertanggungjawaban Komite Audit 2021
5. Laporan Pertanggungjawaban Komite Remunerasi dan Gaji 2021
6. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
7. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
8. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
9. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
10. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
11. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
12. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
13. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
14. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
15. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
16. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
17. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
18. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
19. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
20. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
21. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
22. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
23. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
24. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
25. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
26. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
27. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
28. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
29. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
30. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
31. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
32. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
33. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
34. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
35. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
36. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
37. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
38. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
39. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
40. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
41. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
42. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
43. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
44. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
45. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
46. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
47. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
48. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
49. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
50. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
51. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
52. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
53. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
54. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
55. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
56. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
57. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
58. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
59. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
60. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
61. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
62. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
63. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
64. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
65. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
66. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
67. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
68. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
69. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
70. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
71. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
72. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
73. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
74. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
75. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
76. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
77. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
78. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
79. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
80. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
81. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
82. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
83. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
84. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
85. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
86. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
87. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
88. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
89. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
90. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
91. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
92. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
93. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
94. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
95. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
96. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
97. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
98. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
99. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021
100. Laporan Pertanggungjawaban Komite Pengawasan 2021

Jakarta, 11 Agustus 2022
Direksi Perseroan
PT Usaha Handalan Perkasa